

73

PERBEDAAN JIWA WIRASWASTA PADA MASYARAKAT NELAYAN
YANG MENDAPAT PENDIDIKAN DAN TIDAK MENDAPAT
PENDIDIKAN DARI LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT



KARYA ILMIAH

OLEH

NINI SRI WAHYUNI S. Psi



FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada masa Orde Baru telah berlangsung selama 30 tahun lebih. Akselerasi pembangunan yang sudah dan sedang berlangsung tumbuh dengan cepat. Segala sektor pembangunan ditata secara baik dengan melahirkan berbagai proyek-proyek pembangunan di seluruh negara Republik Indonesia. Sebagai konsekuensinya perkembangan prekonomian Indonesia tumbuh berkesan dengan angka rata-rata 5 - 10% sejak 1970-an sampai dewasa ini Wirosardjono, (dalam Kompas, 1995).

Akan tetapi pertumbuhan ekonomi yang begitu tinggi tidak secara otomatis berimplikasi kepada pemerataan ekonomi/pendapatan. Malah berimplikasi negatif atas munculnya gap pendapatan, khususnya antara penduduk kota dan penduduk desa. Hal ini disebabkan banyak negara berkembang (termasuk Indonesia) melaksanakan program-program pembangunan ekonomi yang cenderung mendahulukan kepentingan penduduk perkotaan (Mubyarto, 1984). Demikianlah, dengan melalui program-program pembangunan ekonomi, pendapatan, tingkat hidup dan mutu kehidupan masyarakat perkotaan meningkat sangat cepat meninggalkan kelompok penduduk di daerah pedesaan. Hasilnya, keadaan kemiskinan perkotaan banyak berkurang, namun tidak demikian halnya bagi masyarakat pedesaan.

Pembangunan yang terfokus di kota (urban) dilaksanakan karena sumber daya manusia khususnya yang tingkat pendidikannya tinggi ada di kota-kota, sementara di desa (rural) tingkat pendidikan sangat rendah. Sementara itu, untuk melaksanakan pembangunan secara efektif dibutuhkan orang-orang yang berpendidikan tinggi. Karena selain mempunyai kemampuan sendiri dalam perencanaan dan pengelolaan, ia juga mempunyai daya kreasi dan inovasi yang diperoleh melalui proses pendidikan. Masyarakat desa tidak memiliki syarat-syarat yang dimiliki oleh masyarakat kota. Menurut beberapa hasil riset, antara lain Popenak (1979), Dimara (1989), memberikan indikasi bahwa pendidikan formal di pedesaan mayoritas hanya sampai tingkat Sekolah Dasar. Fakta-fakta inilah yang menyediakan alasan, pembangunan dimulai dari kota (hulu) dengan harapan "trickel down effect" (tetesan ke bawah) dapat dirasakan oleh masyarakat desa (hilir) (Hagul, 1992).

Untuk mewujudkan strategi "trickel down effect" pemerintah membangun sarana dan prasarana desa, seperti pengadaan jalan yang menghubungkan kota dengan desa. Namun karena hambatan struktural khususnya budaya dan pendidikan yang sangat rendah, harapan "tetesan dari atas ke bawah" tidak dapat berjalan secara efektif. Penduduk desa tidak dapat mengambil manfaat secara maksimal (Saragih, 1992).

Kegagalan "trickel down effect" inilah yang mendorong munculnya SPPP (Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan, sistem bapak angkat, IDT dan mitra kerja seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Oleh karena itu lembaga swasta atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berusaha memberi alternatif untuk membangun masyarakat sebagai akibat gagalnya pembangunan di pedesaan. Model pembangunan yang mereka lakukan dengan terlibat langsung (partisipatori) dan berlainan dengan model pembangunan yang dilaksanakan pemerintah yang bersifat birokratis. Pembangunan partisipatori adalah pembangunan yang dilaksanakan dari dalam (inside) masyarakat sehingga dapat menumbuhkan ide-ide baru yang berorientasi kepada kemandirian/keswadayaan dan peningkatan penghasilan (Saragih, 1992). Dalam hal ini memotivasi tentang keswadayaan dan peningkatan penghasilan ini diberi pendidikan kepada kelompok masyarakat.

Menurut "Dictionary of Education" (dalam Marsial, 1993), pendidikan adalah kumpulan dari semua proses yang memberi kemungkinan kepada seseorang untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan, dan sikap-sikap, bentuk-bentuk tingkah laku yang bernilai positif di dalam masyarakat tempat ia berada. Untuk mewujudkan perilaku yang positif, perubahan sikap dan supaya mempunyai kemampuan dan skill diperoleh dengan cara formal, informal dan nonformal. Salah satu metode pendidikan diberikan materi penumbuhan

motivasi, transfer ilmu pengetahuan dan memberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan kebutuhan peserta didik (Howard, dalam Marsial, 1993).

Dengan tercapainya tujuan pendidikan tersebut, maka penduduk atau peserta didik akan mempunyai motivasi untuk rekreasi, berinovasi dan dapat bekerja sama secara produktif, karena dia sudah mempunyai pengetahuan, skill dan pengalaman untuk mengembangkan diri secara positif. LSM dalam melaksanakan sistem pendidikan menggunakan seperti cara ini, yakni menumbuhkan motivasi transfer ilmu pengetahuan dan memberikan keterampilan-keterampilan berusaha sehingga masyarakat mempunyai jiwa berwira swasta, sehingga penghasilannya meningkat, (Yasika, 1989).

Menurut Winardi (1989), jiwa wiraswasta adalah bakat atau dorongan pada diri seseorang untuk memproduksi barang/jasa untuk meraih keuntungan. Sedangkan menurut Rachbini, (dalam Prisma, 1992), pada masyarakat desa, pengertian wiraswasta menyangkut usaha memproduksi barang/jasa pada sektor-sektor informal dengan struktur modal yang lebih kecil dan sistem pemasaran yang sederhana. Sektor-sektor informal dalam berwiraswasta masyarakat desa adalah diluar lembaga-lembaga formal melainkan pada usaha sendiri dan sistem pemasarannya juga dilakukan secara sederhana dan langsung antar produsen kepada konsumen tanpa perantara (broker) seperti terdapat pada usaha-usaha sektor formal.

Masyarakat desa biasanya beraggotakan petani dan nelayan. Permasalahan petani ataupun nelayan relatif sama, yakni berada dalam kemiskinan, karena terhimpit oleh rendahnya tingkat pendidikan dan hambatan struktur lainnya. Umumnya masalah nelayan mempunyai karakteristik yang sama dengan masyarakat desa yang bukan nelayan, yakni hidupnya monoton, terlalu santai dan bersifat boros (inefisiensi) dalam mengelola keuangan. Pada masa paceklik (angin barat dan terang bulan), mereka hanya bermalasmalas di rumah dan berkumpul dengan teman-teman menghabiskan uang (Mudyarto, 1994).

Oleh karena itu Panayaton (1993), memberikan alternatif untuk meningkatkan pendapatan nelayan, memberikan kegiatan-kegiatan non perikanan untuk menaikkan biaya oportunitis nelayan-nelayan-nelayan kecil tersebut, sehingga pendapatan mereka diperbaiki. Untuk memperbaiki pendapatan nelayan, perlu adanya penyadaran-penyadaran baru dengan merubah sikap agar mereka mempunyai jiwa wiraswasta dan mampu menghasilkan produksi di luar sektor perikanan, seperti home industry, jasa, pemasaran dan lain-lain bagi kaum istri ataupun bagi suami (nelayan) yang menganggur ketika musim angin barat tiba.

Sistem pendidikan yang diberikan LSM Yasika kepada kelompok nelayan binaan dengan tahap-tahap:

1. Penumbuhan motivasi
2. Pengembangan potensi-potensi pribadi

3. Membuat kelompok-kelompok
4. Melepaskan masyarakat nelayan dari tergantung menjadi mandiri.

Tahap-tahap tersebut diberikan karena pada umumnya masyarakat nelayan berpendidikan rendah, sehingga mereka kehilangan jati dirinya. Jadi diperlukan penumbuhan motivasi dan kemandirian sehingga nelayan kembali mengenali jati dirinya. Untuk menumbuhkan jiwa wiraswasta masyarakat nelayan, LSM Yasika memberikan berbagai jenis pengetahuan baik teori maupun pelatihan. Salah satu program pendidikan yang ditargetkan untuk menumbuhkan jiwa wiraswasta adalah "income generating programs", (Yasika, 1989).

"Income Generating Program" merupakan kelanjutan dari kegiatan secara menyeluruh dari empat (4) tahap pendidikan di atas. Biasanya dalam bentuk-bentuk pemberian dan penyuntikan dana-dana atau secara singkat memberikan fasilitas dalam bentuk modal kerja dasar, teknologi, sistem manajemen yang mempunyai orientasi pada perencanaan dan aspek-aspek lainnya yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kelompok binaan (Yasika, 1989).

Dari uraian tersebut penulis merasa tertarik untuk mengadakan riset tentang pendidikan yang diberikan LSM Yarsika kepada kelompok masyarakat nelayan desa Percut.

Adapun judul yang definitif adalah : "Perbedaan Jiwa Wira-
swasta Pada masyarakat Nelayan Yang Mendapat dan Tidak
Mendapat Pendidikan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
Di Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Daerah
Tingkat II Deli Serdang"

B. Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang diharapkan bahwa suatu penelitian mempunyai tujuan tertentu. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbedaan jiwa wira-swasta masyarakat nelayan yang diberi pendidikan dan tidak diberi pendidikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Wiraswasta

1. Pengertian Wiraswasta

Secara umum wiraswasta merupakan kemauan dan kemampuan dengan motivasi tinggi individu atau kelompok individu mengembangkan usaha-usaha yang bersifat produktif secara mandiri dengan menerapkan strategis bisnis yang terencana dan terprogram.

Menurut Jhon F. Nisbitt (dalam Tarmidji, 1992) bahwa wiraswasta merupakan usaha-usaha produktif dalam pengelolaan sumber daya secara terencana dengan memperhatikan motif-motif ekonomi.

Sumber daya yang dimaksud berupa sumber daya manusia (tenaga kerja) sumber daya alam (yang dapat diperbaharui) dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem (lingkungan hidup).

Usaha-usaha produktif dapat mengembangkan hasil-hasil pekerjaan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan motif ekonomi (mendapatkan laba) dan untuk mengembangkan usaha, dalam arti adanya pengetahuan dan pandangan dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada.

Kewiraswasta dalam kajian ilmu sosial merupakan peningkatan terhadap ekonomi dan peningkatan status sosial

budaya masyarakat, dalam memahami sosialnya sebagai bagian dari lingkungan sosial, sehingga terjadi perubahan struktur sosial budaya dan ekonomi masyarakat, menuju pada peningkatan harkat dan martabat manusia serta tidak ketergantungan terhadap pengambil keputusan pada tingkat yang lebih tinggi (Ismawan, 1992).

Perbaikan terhadap struktur sosial budaya dan ekonomi masyarakat adalah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat (*basic needs*) dan kebutuhan aktualisasi dirinya dalam lingkungan sosialnya.

Menurut Maslow (Kootz, Et. Al, 1984) kebutuhan dasar manusia meliputi :

1. Physiological needs. These are the basic needs for sustaining human life it self -food, water clothing, shelter, sleep, and sexual satisfaction.

(Kebutuhan fisik, kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup manusia -makanan, air, pakaian, perumahan, tidur, berumah tangga).

2. Security, or safety needs. These are the needs to be free from physical danger and the fear of loss of a job, property, food, clothing, or shelter.

(Kebutuhan keselamatan dan keamanan. Kebutuhan yang bebas dari tekanan fisik dan kekuatiran kehilangan pekerjaan, harta benda, makanan, pakaian, dan perlindungan).

3. Affiliation, or Acceptance needs. Since people are social beings, they need to belong, to be accepted by others.

(Kebutuhan untuk bergabung dan diterima. Manusia adalah makhluk sosial, mereka ingin bergabung dan diterima oleh kelompok lain).

4. Esteem needs. Once people begin to satisfy their needs to belong, they tend to want to be held in esteem both by themselves and by the other.

(Kebutuhan untuk dihormati, bila orang mulai puas terhadap kebutuhan untuk diterima, maka mereka cenderung ingin untuk dihormati oleh lingkungannya dan oleh orang-orang lainnya).

5. Need for self-actualization. This is the highest needs in his hierarchy.

(Kebutuhan pada aktualisasi diri. Ini merupakan kebutuhan yang paling tinggi pada tingkatannya).

Kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan dasar munculnya usaha-usaha untuk mengembangkan diri dalam pemenuhannya melalui wiraswasta. Pemenuhan kebutuhan ini dapat disamakan secara berkelompok atau kolektif dan mandiri (wiraswasta).

Bentuk usaha yang dilaksanakan dalam kegiatan wiraswasta adalah kewiraswastaan, yakni bentuk usaha yang dikelola secara mandiri dan profesional.

Menurut Tarmudji (1991) bahwa kewiraswastaan adalah salah satu bentuk usaha ekonomi yang merupakan fenomena perkembangan ekonomi manajemen dengan pengelolaan secara profesional dan mandiri dengan pemanfaatan sumber daya yang ada.

Pengelolaan profesional dalam kewiraswastaan dapat memanfaatkan sumber daya (tenaga kerja, modal, pasar, dan metode) sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen, yakni adanya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendaliannya.

Sedangkan Wibisono lebih memfokuskan istilah kewiraswastaan dengan kewirausahaan, yakni kewiraswastaan merupakan bentuk usaha manajemen modern dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya manusia, modal, pemasaran, dan pemeliharaannya secara produktif. Dapat dilaksanakan dalam bentuk perusahaan, kelompok manusia, maupun individu atau keluarga (Swastha, 1981).

Pengertian kewiraswastaan tersebut dapat dikelola dalam bentuk perusahaan-perusahaan, yayasan maupun swakelola (mandiri). Kewiraswastaan adalah identik dengan kewirausahaan, yakni pengelolaan sumber daya yang tersedia untuk mendapatkan hasil (output) yang produktif dan menguntungkan dapat dilaksanakan dengan manajemen modern ataupun manajemen keluarga.

Selanjutnya Tjokroamidjojo (1987) memberikan pengertian kewiraswastaan atau kewirausahaan sebagai fenomena-fenomena sosial dan ekonomi. Kewiraswastaan merupakan bentuk-bentuk usaha mandiri dan produktif kelompok manusia dan individu dengan pemanfaatan sumber daya-sumber daya yang tersedia secara profesional dan rasional untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan sosial.

Jadi menurutnya kewiraswastaan merupakan bentuk usaha produktif dan mandiri, bukan hanya mendapatkan keuntungan dari segi ekonomi, tetapi juga dapat memberi manfaat sosial dan lingkungan sosialnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kewiraswastaan adalah:

1. Bentuk usaha daripada wiraswasta
2. Dikelola secara kelompok, perorangan (individu), maupun keluarga.
3. Pengelolaan secara mandiri dan produktif.
4. Memberi keuntungan ekonomi dan sosial.

2. Prinsip-prinsip Kewiraswastaan

Wiraswasta merupakan fenomena kehidupan manajemen modern dan sosial yang menyangkut sendi-sendi kehidupan ekonomi dan sosial, untuk dapat memberi peningkatan status ekonomi dan sosial individu dan masyarakat.

Menurut Tarmudji (1991) bahwa wiraswasta dan kewiraswastaan memiliki ciri-ciri sebagai bagian dari fenomena ekonomi adalah sebagai berikut:

1. usaha-usaha yang dikelola secara mandiri.
2. usaha-usaha yang bersifat produktif.
3. ditandai dengan adanya modal, sumber daya manusia, pasar dan peralatan yang ada.

Ciri-ciri wiraswasta di atas belum menggambarkan wiraswasta dari segi pemanfaatan waktu yang bersifat efisien, namun ciri-ciri wiraswasta tersebut telah ditandai oleh adanya indikator masyarakat modern.

Sedangkan ciri-ciri wiraswasta adalah identik sama dengan kewirausahaan dalam manajemen modern, yaitu:

1. usaha-usaha yang dikelola secara manajemen modern (prinsip-prinsip manajemen).
2. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya personal, modal, waktu, lingkungan.
3. usaha-usaha yang bersifat mandiri dan produktif.
4. usaha yang memberikan keuntungan ekonomi finansial (Swastha, 1989).

Wiraswasta di atas telah memiliki ciri-ciri yang luas, yakni adanya pengelolaan secara manajemen modern,

dengan penerapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian segala sumber daya yang tersedia dengan tujuan memberi manfaat finansial atau keuntungan ekonomi.

Selanjutnya Djisman Simanjuntak menegaskan bahwa ciri-ciri wiraswasta adalah sebagai berikut:

1. segala pengelola usaha yang bersifat mandiri dan produktif
2. pengelolaan usaha yang bersifat manajemen
3. segala usaha yang bertujuan prinsip ekonomi
4. segala usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan diri dalam ungkapan sosial
5. pengelolaan usaha yang bersifat pemanfaatan sumber daya yang tersedia
6. pemanfaatan lingkungan hidup

Jadi ciri-ciri wiraswasta dapat disimpulkan, yakni:

1. pengelolaan usaha yang bersifat mandiri dan produktif
2. penerapan prinsip-prinsip ekonomi
3. pemanfaatan segala sumber daya yang tersedia secara produktif
4. keseimbangan lingkungan
5. pengelolaan yang memiliki lembaga, yayasan maupun usaha keluarga.

4. Faktor-faktor Pengembangan Jiwa Kewiraswastaan

Peningkatan taraf hidup masyarakat dapat dicapai .lh16 dengan pengembangan usaha-usaha yang bersifat produktif dan mandiri, pengembangan usaha produktif tersebut ditempuh dengan adanya pengembangan jiwa kewiraswastaan dan kewirausahaan pada masyarakat.

Meneurut Moerdiono (dalam Tjokroamidjoyo, 1987) terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat mengembangkan kewiraswastaan tersebut, yakni :

1. Faktor Intern (Kebijakan-kebijakan Pemerintah)

Pengembangan jiwa kewiraswastaan dapat terwujud apabila tercipta lingkungan masyarakat, dengan adanya kebijaksanaan-kebijakansanaan sistim pengembangan kewiraswastaan dan peraturan-peraturan pelaksana yang mendukung sektor usaha tersebut.

2. Faktor Ekstern (Lembaga-lembaga swadaya masyarakat organisasi, organisasi-organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi).

Keberhasilan pengembangan kewiraswastaan didorong juga oleh adanya peranan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi-organisasi profesi yang merasa bertanggungjawab untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pemerintah Kebijakan pengembangan kewiraswastaan selalu mengharapkan adanya peran langsung dari ketiga (3)

lembaga tersebut dalam kerjasamanya mengembangkan taraf hidup masyarakat. Pemerintah memberikan fasilitas-fasilitas untuk mendukung peran aktif lembaga-lembaga swadaya masyarakat tersebut, (Wirosardjono, 1992).

Pengembangan jiwa kewiraswastaan pada masyarakat petani dan nelayan dipengaruhi oleh faktor-faktor modal. Faktor skill dan faktor manajerial terhadap sektor usaha serta adanya, serta adanya perhatian dari lembaga-lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat Profesi-profesi dengan menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap pengembangan jiwa kewiraswastaan (Mubyarto, 1984).

Konsekuensi kemiskinan pada masyarakat nelayan dan petani disebabkan oleh faktor modal yang dimiliki relatif sangat rendah dan modal tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan tidak mencukupi untuk kebutuhan investasi. Faktor skill yang dimiliki juga sangat rendah terhadap pengembangan kewiraswastaan sehingga usaha-usaha yang mereka kelola hanya bersifat pemenuhan kebutuhan keluarga sehari-hari. Serta sistim manajemen yang mereka anut bersifat tidak menentu dan belum mengenal sistim manajemen pengembangan kewiraswastaan yang bersifat modern. (Mubyarto, 1984).

Menurut Soetrisno (dalam Rachbini, 1992) faktor utama pengembangan jiwa kewiraswastaan pada masyarakat nelayan dan petani adalah:

1. Faktor Modal (Capital)

Kapital (modal) adalah sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat berupa uang dan peralatan pendukung seperti perahu bermotor dan peralatan penangkap ikan.

2. Faktor Kemampuan manajerial.

Pengetahuan masyarakat tentang bagaimana mengelola suatu usaha dengan memakai cara-cara atau metode-metode yang efisien dan efektif. Misalnya dengan mengadakan perencanaan dari setiap usaha yang dilakukan.

Jadi faktor modal dan kemampuan manajerial merupakan dua (2) unsur yang saling berkaitan di dalam mendukung pengembangan jiwa kewiraswastaan.

Menurut Wibisono, (dalam Swantha, 1981) bahwa yang dimaksud dengan mengembangkan jiwa kewiraswastaan merupakan segala potensi yang ada pada lingkungannya perlu didayagunakan dan dihasilgunakan secara produktif dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi dan kemanusiaan.

Potensi-potensi pada lingkungan sosial perlu dikembangkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang produktif, namun perlu dijaga adanya keseimbangan ekosistem yang ada. Potensi individu dan kelompok dalam masyarakat (perkotaan dan pedesaan) sering kali bersifat pasif dan selalu tergantung pada keadaan dan alam sekitarnya.

Emil Salim (dalam Tjokroamidjyo, 1987) mengemukakan tentang lembaga-lembaga yang terlibat dalam mengembangkan kemitraan di Indonesia, antara lain :

1. Pemerintah dengan kebijaksanaan ekonomi dapat memacu dan merangsang tumbuhnya jiwa wiraswasta pada masyarakat.
2. Swasta, dengan kapital dan manajerial yang dimiliki dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dalam ekonomi untuk dapat mengembangkan taraf hidup ekonomi lemah.
3. BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dengan modal dan peluang bisnis dapat menjadikan masyarakat ekonomi lemah menjadi bagian dari BUMN tersebut.

Keterlibatan ketiga lembaga tersebut dapat memainkan perannya, karena memandang sebagian besar masyarakat berada pada taraf ekonomi lemah, sehingga secara modal dan manajerial mereka tidak mampu mengembangkan kewiraswastaan mereka.

Pengembangan jiwa kewiraswastaan (Tarmidji, 1991) dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Mampu melihat dan melaksanakan kesempatan pada peluang-peluang usaha yang ada.
2. Mampu memanfaatkan sumberdaya-sumberdaya yang ada.
3. Mampu membaca keadaan pasar.
4. Mampu mencari pasaran-pasaran hasil produksi.

5. Mampu membudidayakan hasil-hasil produksi.
6. Meningkatkan hasil pelayanan yang baik.
7. mampu memanfaatkan sistim teknologi pendukung usaha.
8. Selalu melihat secara ekonomi keadaan usaha.

Jiwa kewiraswastaan tersebut tidak semua orang dapat meilikinya, namun melalui pengalaman, pendidikan yang didapat dari lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non-formal (subsistem). Jalur tersebut menyebabkan orang dapat mengelola usaha-usahanya secara berdaya guna dan berhasil guna.

Jadi faktor-faktor jiwa kewiraswastaan dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu secara internal dan eksternal. Secara internal datang dari diri manusia itu sendiri dan secara eksternal datang dari pengaruh luar dirinya.

4. Aspek-Aspek Kewiraswastaan

Umumnya individu atau kelompok masyarakat yang berhasil dalam mengelola dan berhasil mengembangkan usaha kewiraswastaan merupakan mereka yang telah tekun dan konsisten terhadap pelaksanaan usaha-usaha yang ia lakukan secara produktif.

Prinsip-prinsip kewiraswastaan yang produktif menurut Fort, (dalam Tarmudji, 1991) adalah sebagai berikut :

1. Percaya diri, yakni kepercayaan pada diri sendiri serta tidak tergantung pada orang lain dalam berusaha. Percaya diri mengandung pengertian dapat mengenali diri sendiri menyangkut kelemahan dan kelebihan secara baik. Disamping itu setiap keputusan-keputusan yang ditetapkan merupakan suatu keteguhan hati dan tidak mudah dipengaruhi orang lain, (Hasan, 1992).

Dari pengertian tersebut percaya diri dapat juga disebut sebagai suatu keteguhan hati seorang dalam menentukan sikap yang mempunyai integritas dan tidak mudah oleh hasutan-hasutan orang lain.

2. Berorientasi pada pekerjaan dan hasil, yakni kebutuhan akan prestasi, berorientasi pada laba, tekun dan tabah, dan menekankan kepada peningkatan hasil-hasil produksi. Berorientasi kepada pekerjaan dan hasil juga sangat penting dalam memupuk jiwa wiraswasta. Dengan pekerjaan seseorang menyumbangkan pikiran, tenaga dan waktu dengan maksud untuk memperoleh hasil. Hasil ini dapat diperoleh dalam bentuk uang, barang dan natura.

3. Kepemimpinan (leadership), yakni kemampuan untuk menyakinkan kepada orang lain untuk berpartisipasi dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan usaha.

Menurut Kartono (1987), kepemimpinan adalah suatu keadaan dimana seseorang dapat mempengaruhi orang lain agar dapat bertindak sesuai dengan keinginan seorang pemimpin.

Jadi faktor kepemimpinan sangat menentukan dalam mewujudkan suatu tujuan untuk meraih cita-cita dibidang usaha wiraswasta.

4. Orisinilitas, yakni inovatif dan kreatif, fleksibel. Berfikir inovatif adalah kemampuan membuahkan ide-ide atas hal-hal yang baru sifatnya. Dengan perkataan lain berfikir inovatif merupakan perubahan cara-cara berfikir yang lama (tradisional) kepada cara-cara berfikir yang baru (modern) dalam mengelola usaha.

Menurut Sarwono (dalam Kompas 1996), kreativitas artinya mampu melihat dan mencari berbagai alternatif dalam memilih yang terbaik.

Jadi baik inovatif maupun kreatif harus berjalan secara paralel, karena inovasi tidak mungkin diperoleh tanpa adanya kreatifitas dan demikian pula sebaliknya.

5. Berorientasi ke masa depan, yakni pandangan ke depan, dan mempunyai cita-cita untuk maju.

Berorientasi ke masa depan berarti kemampuan seseorang untuk mempersiapkan diri atas kejadian-

kejadian dimasa yang akan datang, sehingga pekerjaan yang akan dikerjakan pada saat sekarang adalah untuk kepentingan dimasa yang akan datang pula.

Menurut Rachbini (1922) untuk menyiasati masa depan masyarakat dapat dilakukan dengan usaha-usaha antara lain:

- a. Bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang maksimal.
- b. Mengadakan tabungan (investasi).

Jadi dari teori-teori di atas dapat disimpulkan aspek-aspek wiraswasta merupakan faktor-faktor yang membentuk kepribadian seseorang wiraswastawan untuk memperoleh kemajuan-kemajuan dibidang usahanya dengan adanya sikap percaya diri, berorientasi kepada pekerjaan dan hasil, mempunyai bakat kepemimpinan, inovatif dan kreatif serta berorientasi ke masa depan.

B. Pendidikan

1. Pengertian Pendidikan

Pengertian pendidikan secara umum adalah perbuatan manusia yang sangat fundamental yakni mendidik dan membimbing sehingga individu atau kelompok dapat lebih mengenal jati dirinya untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dirinya.

Berikut ini akan disajikan beberapa batasan atau pengertian pendidikan (dalam Taniamin, Et. Al, 1992), antara lain Francis J. Brown (1985), bahwa pendidikan adalah proses yang secara terus menerus dikendalikan yang bertujuan untuk mengadakan perubahan di dalam sikap bakat yang dihasilkan oleh seseorang atau melalui orang di dalam satu kelompok. Di sisi lain, menurut John Deney (1987), pendidikan berarti suatu proses pembimbingan dan pendewasaan. Bila kita memperoleh hasil dari suatu proses pemikiran, berarti kita mengistilahkan pendidikan sebagai pembentuk dan pengatur aktivitas, sebagai suatu pembentuk pada bentuk standar aktivitas sosial. Sementara itu Ellis Et. Al. (1987) memberikan batasan pendidikan sebagai totalitas pengalaman pengetahuan seseorang individu dalam kehidupannya dan bukan hanya pengalaman pengetahuan formal yang terorganisir. Pendidikan juga merupakan proses, dimana individu memperoleh pengetahuan untuk dan dari diri pribadinya dan juga dari lingkungannya.

Dari definisi di atas dapat digambarkan bahwa pendidikan bukan hanya bersifat formal yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pemerintah yang terorganisir, tetapi juga yang bersifat nonformal yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga non-pemerintah yang tujuan utamanya adalah pemerataan kecerdasan, sehingga individu ataupun kelompok individu dapat merubah struktur sosial, ekonomi dan budayanya terhadap kehidupan yang lebih baik.

Proses pendidikan mempunyai peranan dalam pemberian bantuan dana perkembangan manusia menjadi lebih pribadi dewasa dalam arti seluas-luasnya yakni dengan sengaja menyediakan dan menggunakan alat-alat untuk mencapai suatu tujuan tujuan pendidikan.

Proses pendidikan secara umum merupakan, (Masrial, 1983) :

1. Pendidikan adalah suatu proses terhadap individu berlangsung terus sampai individu mencapai dewasa susila. Proses ini berlangsung dalam jangka waktu tertentu.
2. Pendidikan merupakan perbuatan manusia. Pendidikan lebih dari pergaulan antar orang yang dewasa dan orang yang belum dewasa dalam suatu kesatuan hidup. Tindakan mendidik yang dilakukn oleh orang dewasa dengan sadar dan sengaja didasari oleh nilai-nilai kemanusiaan.
3. Pendidikan merupakan hubungan antar individu pendidik dan individu. Dalam pergaulan terjadi kontak atau komunikasi antar masing-masing pribadi. Hubungan ini jika meningkat ke taraf pendidikan, maka menjadi hubungan antar pribadi pendidik dan pribadi indivian.
4. Hasil pendidikan. Tindakan atau perbuatan mendidik menuntun individu mencapai tujuan-tujuan tertentu dan

hal ini nampak pada perubahan-perubahan dalam diri individu atau kelompok individu.

Jadi pendidikan merupakan proses pendewasaan diri seseorang untuk dapat memahami tentang kepribadian dan lingkungannya yang diperoleh melalui transfer ilmu pengetahuan yang diperolehnya dari pendidik kepada orang yang di didik.

2. Bentuk-Bentuk Pendidikan

Menurut Philip H. Coombs bahwa bentuk pengelolaan pendidikan dibedakan menjadi tiga (3) bagian, yaitu : (a) pendidikan informal, (b) pendidikan formal, dan (c) pendidikan non-formal (Idris, 1986).

Pendidikan non-formal sering juga disebut pendidikan luar sekolah, yaitu pendidikan yang didapatkan seseorang secara teratur, terarah, disengaja tetapi tidak terlalu mengikuti peraturan yang ketat. Pendidikan non-formal bersifat fungsional dan praktis yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja pada peserta, baik itu individu maupun kelompok masyarakat.

Menurut Ival Illich bahwa pengelolaan pendidikan dibagi dalam tiga bentuk, yakni : (a) pendidikan formal, (b) pendidikan informal dan, (c) pendidikan subsistem (dalam Dimaria, 1985).

Sebenarnya istilah pendidikan non-formal (subsistem) dan informal mempunyai pengertian yang sama, yaitu mencakup pendidikan yang diadakan di luar sekolah.

Pendidikan informal adalah pendidikan yang berlangsung dalam setiap aktifitas manusia. Pendidikan informal sering juga disamakan dengan sosialisasi dimana terdapat adanya pengalihan ilmu pengetahuan, pengalaman-pengalaman dari satu individu kesatu individu lain atau dari satu kelompok ke kelompok lainnya, (Sumarno, 1985).

Pendidikan formal adalah pendidikan yang disengaja dan mengikuti peraturan yang ketat. Biasanya pendidikan formal ditempatkan dalam sistem sekolah dan kelas-kelas dan mempunyai program yang terarah.

Pengertian subsistem dapat juga diartikan diluar sistem dan dalam konteks pendidikan diluar sistem (pendidikan formal) ataupun nonformal. Jadi pengertian pendidikan nonformal dan pendidikan subsistem mempunyai pengertian yang sama baik dari segi makna maupun hakekatnya, (Sumarsono, 1985).

Dari beberapa bentuk-bentuk pendidikan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan proses yang terus-menerus dialami dan terdapat 3 (tiga) bentuk pendidikan yaitu: pendidikan formal, pendidikan informal dan pendidikan nonformal.

3. Tujuan Pendidikan

Negara merupakan suatu lingkungan masyarakat yang diatur secara hukum. Setiap negara mempunyai pandangan hidup tertentu yang menjadi tuntunan hidup dan kehidupan bernegara (berbangsa). Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga nilai-nilai Pancasila menjadi dasar pendidikan nasional dan sekaligus tujuan pendidikan nasional.

Di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), dinyatakan: pendidikan nasional berdasarkan Pancasila, bertujuan untuk meningkatkan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal rasa kebangsaan dan cinta tanah air, agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa (TAP MPR No.II/MPR/1983 tentang GBHN).

Jadi secara singkat bahwa tujuan pendidikan nasional adalah menciptakan manusia yang mempunyai ciri-ciri :

1. Bertqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Cerdas, terampil, berbudi pekerti.
3. Mempunyai semangat kebangsaan.
4. Dapat membangun diri sendiri.
5. Bersama orang lain membangun bangsa.

Tujuan Pendidikan lembaga-lembaga kemasyarakatan merupakan keterkaitan lembaga keluarga, lembaga pemerintah

dan lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan tersebut dapat berupa pendidikan yang dilakukan oleh lembaga non-formal, seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup pada struktur ekonomi dan sosial masyarakat miskin.

Pemerataan menikmati hasil pembangunan merupakan salah satu realisasi prinsip keadilan sosial. Prinsip itu terus dipegang sebagai penentu kebijaksanaan nasional. Salah satu bentuk pemerataan menikmati pendidikan, sebagai realisasi strategi pembangunan nasional melalui 8 jalur pemerataan.

C. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sebagai

Lembaga Pendidikan Formal

1. Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

LSM merupakan akronim Lembaga Swadaya Masyarakat, yang merupakan suatu kelompok yang mengorganisasikan dirinya dalam pembangunan dari aspek ekstra birokrasi.

LSM adalah suatu lembaga yang didirikan oleh masyarakat dan bekerja atas dorongan pengabdian kepada sekelompok masyarakat yang terbelakang secara ekonomi, politik dan hukum, sehingga ia mengerti hak dan kewajibannya sebagai warga negara dengan cara merubah sikapnya (Saragih; 1992).

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat itu dibentuk oleh masyarakat dan digunakan untuk kepentingan masyarakat juga.

Menurut instruksi Menteri Dalam Negeri No 8 Tahun 1990 disebutkan, LSM adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atau kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan pengabdian secara swadaya.

Jadi pengertian LSM dapat disimpulkan sebagai suatu organisasi kemasyarakatan yang lahirnya dari masyarakat dan mengabdikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah/miskin agar penghasilannya meningkat. Dalam mengadakan pengabdian LSM memberikan pendidikan dan bantuan keuangan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan permasalahan utama dalam masyarakat miskin di pedesaan adalah rendahnya pendidikan formal dan tidak adanya modal dalam peningkatan usaha.

Sasaran-sasaran pendidikan yang diberikan oleh LSM (Yassika, 1992) adalah :

a. Membenahi Administrasi

Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kebutuhan-kebutuhan sosial, ekonomi, lingkungan dan hak azasi masyarakat.

- b. Menciptakan dan membangun sistem informasi
Untuk dapat membantu kemungkinan-kemungkinan pembangunan/pengembangan aktifitas dalam kegiatan sosial ekonomi, lingkungan dan hak azasi.
- c. Memberikan pengetahuan dan kesadaran hukum
Dimaksudkan agar dapat masyarakat dapat memperoleh berkembang di pedesaan, khususnya dalam menyadari hak hukumnya sebagai pribadi dan sebagai kelompok masyarakat.
- d. Pemberian pengetahuan dan kesadaran lingkungan
Dimaksudkan agar masyarakat dapat menyadari hak-hak pribadi secara hukum dan sadar lingkungan.
- e. Pemberian pengetahuan dan kemampuan terhadap wanita desa
dimaksudkan agar wanita dapat lebih berdaya guna, berperan dan mempunyai persamaan hak dengan pria didalam keluarga ataupun ditengah-tengah masyarakat.

Model pendidikan yang diberikan (Yassika, 1992)

adalah:

1. Awareness Program (Program Penyadaran).
2. Program penyadaran ini memberikan pengetahuan-pengetahuan umum kenegaraan, kemasyarakatan, sosial ekonomi dan bentuk-bentuk motivasi, yang kesemuanya hal ini diberikan dengan sistem/metode/cara ilmiah, sehingga masyarakat menjadi lebih memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai masyarakat ekonomi. Program

penyadaran ini diberikan dengan cara khusus dan cara tatap muka, sehingga diharapkan kesadaran tentang kemandirian masyarakat akan tercapai dengan baik.

2. Training Program (Program Pelatihan).

Program pelatihan merupakan sistem pendidikan yang diberikan secara intensif untuk mendidik kemampuan skill masyarakat. Materi pelatihan yang diberikan antara lain: Organisasi manajemen, Kepemimpinan, strategi dan metode pembangunan masyarakat untuk mempercepat proses kemandirian masyarakat dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada masa yang akan datang.

3. Income Generating Program (Program Menambah Pendapatan).

Program penambah pendapatan merupakan program lanjutan dari kesemuanya program-program tersebut diatas. Biasanya bentuk dari program ini dengan memberikan pengetahuan penumbuhan sikap dan bantuan modal (dana) dan manajemen.

2. Fungsi dan Tujuan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan tingkatan lembaga swadaya masyarakat yang kehadirannya adalah untuk menjawab tantangan pembangunan-pembangunan yang secara makro tidak dapat menyentuh persoalan mikro pembangunan di tengah-tengah masyarakat.

Menurut Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1982 disebutkan bahwa LSM merupakan organisasi yang tumbuh secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat dan berminat serta dalam bidang lingkungan hidup (Saragih, 1993).

Pada awalnya LSM hadir dengan fokus perhatian lingkungan hidup, seperti pelestarian ekosistimnya. Maka sesuai dengan gerak perkembangan pembangunan, maka fokus perhatian LSM lebih tercermin pada persoalan-persoalan masyarakat secara langsung.

Konsekuensi perubahan tersebut, maka misi LSM saat ini yakni dengan adanya perluasan peraturan Undan-undang dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1990, yang disebutkan bahwa: LSM adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh masyarakat warga negara Republik Indonesia atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/ lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan pengabdian secara swadaya (Saragih, 1993).

Program kerja LSM tidak bersifat 'sinterklas', dengan cara mebagi-bagikan duit atau dana secara cuma-cuma, dan program dasar dari LSM adalah berupaya menumbuhkan kesadaran-kesadaran baru pada masyarakat, dengan cara mengubah sikap mereka.

LSM merupakan suatu kelompok yang mengorganisasikan

dirinya di dalam pembangunan dari sisi ekstra birokrasi. LSM lahir dari masyarakat dan bekerja untuk masyarakat, khususnya dalam pembangunan keswadayaan/kemandirian masyarakat, menciptakan kemampuan akomodatif terhadap pembangunan dan menciptakan inovasi masyarakat dalam rangka pembangunan yang berlanjutan dan juga konsern terhadap masalah lingkungan hidup.

Dalam laporan tahunan PBB komisi "Development and Environment" dituliskan bahwa pergerakan LSM (NGO): "A few international NGO's deal good basis with both environment and development issues (Environment and Development Comission, 1989).

Perencanaan dan program-program pembangunan yang ditanamkan kepada masyarakat lebih mencerminkan 'arus bawah', dimana progream pembangunan tersebut mengikutsertakan masyarakat mulai dari perencanaan sampai kepada evaluasi program pembangunan. LSM tidak bersifat birokratis dan menerapkan sistim komunikasi yang berdaya guna serta berhasil guna, dengan demikian pemecahan persoalan masyarakat dapat dilaksanakan lebih dan dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

LSM mempunyai otonomi sendiri-sendiri dan sangat kreatif dalam proses pemecahan masalah. Dia juga bisa saja berhubungan dengan siapa saja dalam proses pemecahan masalah (Saragih, 1993).

LSM tidak bekerja secara bertele-tele dan bersifat

tidak terlalu birokratif yang sangat panjang, namun lebih menerapkan pemecahan persoalan yang bersifat komunikatif terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.

Menurut Wirosardjono bahwa LSM mempunyai sifat-sifat, yakni :

1. Bersifat nirlaba (non profit), dibentuk bukan untuk mencari keuntungan.
2. Bukan perpanjangan tangan pemerintah, organisasi publik, business, tapi bersifat independent.
3. Meningkatkan keswadayaan masyarakat.
4. Memperhatikan pelestarian alam (Wirosardjono, 1992).

Dengan demikian LSM merupakan aktivitas yang didasarkan oleh naluri kemanusiaan untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat, terutama peningkatan kualitas manusia dan kelestarian lingkungan hidup.

3. Peranan LSH dalam Pembangunan Nasional

LSM mempunyai misi dan orientasi dalam peningkatan taraf hidup masyarakat sehingga lembaga tersebut sangat berpihak pada masyarakat kecil. Keberadaan LSM sangat bermanfaat terhadap kerangka pembangunan nasional. Persoalan-persoalan ketidakmampuan pemerintah menangani masalah mikro pembangaunan dan terbatasnya anggaran APBN/APBD telah dapat dijawab dan dipecahkan oleh LSM.

Perlengkapan dan suppliser LSM sebagian besar

berasal dari lembaga-lembaga donor luar negeri, sehingga keberadaan LSM lebih dilihat sebagai "development force". Pandangan ini sebenarnya akibat adanya globalisasi masyarakat dunia yang mana iptek menjadi mediana.

LSM sesuai dengan tujuannya adalah proses penggerakan masyarakat, yakni proses mengajak masyarakat untuk lebih mengenal masalah dan kepentingannya sendiri.

Menurut Rustam Ibrahim bahwa keberadaan LSM tersebut adalah sering kita hanya mendapatkan gambaran tentang LSM berubah dari sudut pandang organisasi atau segi ruang lingkup kegiatannya. Kesan lain yang kita peroleh adalah bahwa seolah-olah LSM dan negara merupakan dua lembaga yang terpisah dan tidak berhubungan dan bahkan selalu bertentangan satu sama lain (Wirosardjono, 1992).

Pandangan yang bersifat dikotomi di atas disebabkan disatu sisi, LSM beraktifitas dari kegagalan pemerintah dalam memecahkan persoalan-persoalan pembangunan. Disisi lain, pemerintah bersifat monolitik, dan menganggap pembangunan yang dilakukan tidak perlu campur tangan dari pihak lain. Dengan perkataan lain, pelaksana dan pekerjaan pembangunan secara tunggal dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah.

Secara umum dapat dilihat bahwa tingkat kemakmuran dan ukuran besarnya usaha yang dikelola oleh masyarakat pedesaan dan nelayan didominasi pada tingkat lapisan-lapisan bawah, dalam arti skala usaha yang dikelola

sangat kecil dan bersifat tradisional serta tingkat kemakmuran yang berada pada garis kemiskinan.

Kebanyakan warga masyarakat pedesaan dan nelayan yang hidup dan tumbuh dari usaha memproduksi komoditas-komoditas pertanian dan laut sangat ditentukan oleh tingkat teknologi budidaya yang digunakan, permintaan pasar bagi produknya, tingkat harga produk, dan sarana produksi dengan harga yang layak.

Skala usaha yang sangat kecil menyebabkan petani dan nelayan memproduksi tanpa mampu menggunakan peluang-peluang yang menguntungkan, sehingga tingkat kemakmuran mereka boleh dikatakan hanya ditentukan oleh luasnya lahan dan besarnya alat produksi yang mereka kuasai (Saragih, 1989). Dengan demikian masyarakat desa dan nelayan tidak mempunyai alternatif untuk keluar dari kemiskinan, sehingga mereka terkungkung oleh struktur ekonomi nasional dan internasional dan hidup dalam kemiskinan struktural.

Kebijakan dan strategi pembangunan yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah belum mampu memecahkan persoalan-persoalan pembangunan masyarakat pedesaan dan nelayan. Program-program pembangunan yang ditujukan bagi kemakmuran masyarakat pedesaan dan nelayan telah menimbulkan dampak ketergantungan masyarakat pedesaan dan nelayan terhadap pemerintah.

Oleh karena itu LSM berperan dalam mewujudkan

program-programnya melalui mekanisme perencanaan pembangunan dari bawah (Bottom up planning). Program tersebut mempergunakan pendekatan-pendekatan, yakni : studi awal, pengadaan pendidikan, pelatihan, dan transfer teknologi.

D. Masyarakat Nelayan dan Permasalahannya

Secara umum dapat dikatakan bahwa nelayan adalah orang bekerja menangkap ikan di laut. Penangkapan tersebut dapat dilakukan dengan metode tradisional, yakni dengan cara memancing, menjala secara konvensional, dengan mempergunakan kapal tanpa motor. Semi modern dilakukan dengan perahu motor, sedangkan secara modern dilakukan dengan kapal motor besar dengan mempergunakan teknologi yang bersifat otomatis, (Tarigan 1991).

Nelayan di Indonesia pada umumnya adalah para nelayan tradisional yang hidup dibawah garis kemiskinan. Umumnya kegiatan nelayan yang mereka lakukan secara kecil-kecilan dan hanya berlayar beberapa meter dari pantai dan perlengkapan yang mereka pergunakan kebanyakan bersifat tradisional, (Mubyarto, 1984).

Pandangan ekologi (Galbrath, 1989), bahwa mata pencaharian nelayan dapat dibagi menjadi dua jenis:

1. Penangkapan di laut adalah semua kegiatan penangkapan di laut dan muara-muara sungai dan tempat-tempat lain yang dipengaruhi oleh pasang surut.

2. Budidaya dilaut adalah semua kegiatan yang dilakukan dilaut/perairan yang dipengaruhi pasang surut.

Sehingga kenyataannya mata pencaharian nelayan dipengaruhi oleh pasang surut dan kegiatan cuaca yang ada serta keadaan lingkungan dan sungai-sungai, yang mana konsekuensinya tingkat kemakmuran masyarakat nelayan ditentukan oleh keadaan-keadaan tersebut diatas.

Nelayan dapat dibagi dalam beberapa kelas menurut statusnya, yaitu nelayan berperahu dan nelayan bermotor. Nelayan berperahu adalah yang menggunakan perahu (tanpa motor) dalam penangkapan ikan dilaut. Nelayan bermotor adalah nelayan yang menggunakan perahu bermotor atau kapal motor dalam penangkapan ikan dilaut. Pada kapal motor ini terdapat tiga jenis nelayan: buruh, juragan dan nelayan pemilik kapal (Kelin Tarigan, 1991).

Pada umumnya nelayan buruh dan nelayan berperahu adalah golongan yang banyak hidup dibawah garis kemiskinan; persoalan-persoalan yang mereka hadapi hanya berkisar pada lingkungan sekitar serta budaya-budaya yang mereka hadapi.

Kemiskinan nelayan (Mubiarto, 1988) disebabkan oleh banyak hal, antara lain :

1. Berhubungan dengan moral, susunan, lingkungan pendidikan, kesehatan, kegagalan yang sudah merupakan nasib terhadap dirinya.
2. Kemiskinan alam, sistem pemerintah dan sisitem ekonomi dalam pembangunan di negaranya.

Persoalan di atas disebabkan oleh kebijaksanaan pemerintah dibidang perikanan tidak berorientasi pada usaha peningkatan kesejahteraan nelayan, hanya bertumpu pada peningkatan produksi. Lemahnya sistim pemasaran, yakni dari segi produksi sebenarnya nelayan sudah memperoleh hasil yang besar, akan tetapi tidak disukung oleh sistim pemasaran yang baik, sehingga banyak diantara nelayan menjual hasil tangkapannya kepada pedagang-pedagan yang mengambil keuntungan yang besar.

Permasalahan lain yang dihadapi nelayan tradisional beroperasinya kapal-kapal modern penangkap ikan seperti pukat harimau. Walaupun sistim ini telah dilarang bahkan telah dihapus oleh pemerintah, namun pukat teri dan pukat salome masihs tetap berjalan dan malah mempergunakan sistim komputerisasi, akibatnya nelayan tradisional/kecil terganggu total (Effendi, 1990).

Konsekuensinya nelayan tradisional sulit bersaing dalam mendapatkan hasil tangkapan karena disapu oleh nelayan dengan teknologi modern tersebut. Apalagi nelayan tradisional sering kali hanya mengandalkan perahu sederhana dengan sistim jala/penangkapan dengan sederhana pula.

Permasalahan yang lainnya datangnya musim angin barat yang menyebabkan nelayan berhenti mencari ikan. Pada musim angin barat disertai dengan tiupan angin yang kencang, ombak yang jeras dan disertai dengan hujan yang lebat.

Datangnya musim angin barat telah membuat nelayan tidak mempunyai penghasilan sehingga sering kali mereka kepada ijon-ijon dan tengkulak-tengkulak dengan sistim bunga pinjam yang tinggi.

Permasalahan-permasalahan tersebut menyebabkan tingkat kemakmuran masyarakat nelayan berada pada garis kemiskinan dan diharapkan semua pihak ikut serta berperan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan.

Permasalahan-permasalahan yang dialami nelayan adalah alamiah seperti angin Barat yang membuat nelayan tidak menangkap ikan. Selanjutnya masalah yang dihadapi nelayan adalah terdaaptnya nelayan modern dengan sistem pukat hariamau atau sejenisnya, sehingga nelayan tradisional kurang mampu bersaing dalam menangkap ikan, sehingga taraf hidup nelayan tetap rendah dan sulit berkembang.

BAB III

PEMBAHASAN

Upaya LSM dalam Pengembangan Jiwa Wiraswasta

Masyarakat Nelayan

Maksud pengelolaan pendidikan adalah mensejahterakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat (manusia), sehingga hakekat dan martabatnya diletakkan pada tingkat yang lebih tinggi, sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

Pendidikan subsistem atau non formal merupakan salah satu pengelolaan pendidikan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga swadaya kemasyarakatan pada masyarakat nelayan.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut, yang mana adanya indikasi tingkat perekonomian masyarakat nelayan masih dibawah garis kemiskinan, (Hagul, 1992).

Lembaga swadaya masyarakat merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan non-pemerintah yang muncul dan bertanggung jawab atas keprihatinan keadaan sosial ekonomi masyarakat nelayan dan sebagai jawaban alternatif atas ketidak mampuan mengelola pendidikan (pemerintah) dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi dalam masyarakat nelayan.

Kondisi-kondisi sosial dan ekonomi kemasyarakatan tersebut merupakan peristiwa budaya, sehingga bila dilihat dari peristiwa, maka "pembangunan" adalah proses pengembangan dan penggantian "sarana" budaya. Membentuk sarana budaya yang sesuai dengan tuntutan keadaan. Sebagai peristiwa budaya, pengembangan suatu kondisi kemasyarakatan adalah proses sosial berjangka panjang, yang melibatkan banyak pihak dalam suatu interaksi sosial. Ia tidak sama dengan sekedar merencanakan dan melaksanakan suatu proyek pembangunan (Sasono, 1992).

Realisasi tujuan pembangunan nasional, maka misi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) (Rahadjo, 1992) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap situasi diri dan lingkungannya, sehingga mampu mengadakan respon terhadap persoalan yang mereka hadapi dan respon terhadap program kebijaksanaan pemerintah.

2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai sumber daya yang mereka miliki dan peluang-peluang yang dapat mereka raih untuk memperbaiki kondisi kondisi kesejahteraan dan pendapatan mereka.
3. Mengembangkan kelompok-kelompok kerja sebagai forum pembentukan usaha bersama.
4. Memberikan latihan-latihan teknis dan manajerial gabungan dalam rangka modal sebagai kontribusi terhadap modal yang disediakan dari luar.
5. Menggerakkan kegiatan masyarakat secara kolektif maupun individual.

Lembaga swadaya masyarakat mempunyai keterkaitan dengan lembaga-lembaga pemerintah dan dalam pemanfaatan dan pembangunan fasilitas-fasilitas yang diberikan pemerintah terutama pada lingkungan sosial ekonomi yang lemah.

Melihat kondisi-kondisi tujuan dan misi lembaga swadaya masyarakat tersebut, maka pengembangan jiwa wiraswasta pada masyarakat nelayan merupakan salah satu alternatif untuk memecahkan ketimpangan-ketimpangan sosial ekonomi mereka.

Kenyataan kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan sebelum adanya pembinaan yang dilakukan oleh LSM mengalami kesengsaraan.

Seluruh aktivitas masyarakat nelayan hanya di laut dan sesudahnya di rumah tangga menunggu turun ke laut lagi. Akibat merajalelanya para tengkulak dan musim angin laut menyebabkan sosial ekonomi sangat memprihatinkan.

BAB IV

KESIMPULAN

Ada perbedaan jiwa wiraswasta antara masyarakat nelayan yang mendapat dan tidak mendapat pendidikan dari Lembaga Swadaya Masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Ancok, Djamaluddin, 1989, Tehnik Penyusunan Skala Pengukuran, Yogyakarta, Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- Arikunto, Suharsimi, 1985, Prosedur Penelitian, Suatu Prndekatan Praktis, Bina Aksara, Jakarta.
- Azwas, S., 1992, Reliabilitas dan Viabilitas, Yogyakarta, Sigma Alpha
- Barnadib dan Sutari Imam, 1986, Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis, FID-IKIP, Yogyakarta.
- Driyarkara, 1980, dasar-dasar Ilmu Pendidikan, Kanisius, Yogyakarta,
- Efendi, Erman, 1990, Nasib Nelayan Tradisional di Tanjung Tiram, Harian Waspada.
- Galbraith, 1989, Hakekat Kemiskinan Massa, Sinar Harapan, Jakarta.
- Gerungan, W.A., 1986, Psikologi Sosial, Eresco, Bandung.
- Hadi, S., 1986, Metodologi Research 2, Yogyakarta, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.
- Hagul, Peter, 1992, Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan Dian Desa, Yogyakarta.
- Idris, dan Sahara, 1986, Dasar-dasar Kependidikan, Angkasa, Padang.
- Ismaman, Bambang, 1992, Pendidikan yang Diperlukan untuk Pengembangan Pedesaan, Yayasan Dian Desa, Yogyakarta.
- Koontz, Harold , Et. Al., 1984, Menagement Eighth Edition, Mc.Graw-Hill, International Book Company.
- Manullang, M., 1982, Pengantar Ekonomi Perusahaan, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 1988, Dasar-dasar Manajemen, Ghalian Indonesia, Jakarta.
- Marahudin, Firial, Ed., 1987, Ekonomi Perikanan, PT. Gramedia Jakarta.

- Masrial, 1993, Teras Kuliah Belajar-Mengajar Aktif, Angkasa raya Padang.
- Mubyarto, 1984, Nelayan dan Kemiskinan, Yayasan Agroekonomika, Rajawali Perss, Jakarta.
- Nawawi, Hadari, 1990, Metodologi Riset, Erlangga, Jakarta.
- Papanek F., Gustar, 1987, Ekonomi Indonesia, PT. Gramedia, Jakarta.
- Rachbini, J.A., 1992, Kewiraswastaan pada Sektor Informal, Prisma, LP3S, Jakarta.
- Rahardjo, M., Dawam, 1992, Keswadayaan dalam Pembangunan Sosial-Ekonomi, LP₃S Jakarta.
- Saragih, Sebastian, 1993, Membedah Perut LSM, Jakarta, Penebar Swadaya.
- Sasono, Adi, 1992, Kondisi Kemasyarakatan dalam Perwujudan Keswadayaan Nasional, LP₃S Jakarta.
- Sudijono, Anas, 1991, Pengantar Statistik Pendidikan, Rajawali Pers, Jakarta.
- Surjadi, A., 1989, Pengembangan Management Desa, Manda Madju CV, Bandung.
- Suryabrata, Sumadi, 1984, Psikologi Pendidikan, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sumarno, 1985, Pengantar Umum Pendidikan, Rajawali Pers, Jakarta.
- Swastha, D.H., Basu, 1981, Azas-Azas Marketing, Edisi Kedua, Liberty, Yogyakarta.
- Tanian, Mens, Et. al., 1992, Dasar-dasar Ilmu Kependidikan Gramedia PT, Jakarta.
- Tarigan, Kelin, 1993. Dampak Motorisasi terhadap Distribusi Pendapatan Nelayan di Sumatera Utara, Disertasi Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Tarmidji, 1991, Kewiraswastaan, Rineka Cipta, Bandung.

- Tarsis, Tarmudji, 1992, Manajemen Bisnis, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Tjokroamidjoyo, Bintoro, 1987, Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan, Perkembangan Teori dan Praktek, LP₃S Jakarta.
- UNO, Environment and Development Comission, 1989, our Commond Future, Oxford University, USA.
- Wasis, 1986, Pengantar Ekonomi Perusahaan, Penerbit Alumni, Bandung.
- Winarti, 1990, Kewiraswastaan pada Wilayah Pedesaan, Suatu Telaah Penelitian, Rajawali Pers, Jakarta.
- Wirosardjono, Soetjipto, 1995, Harian Kompas.
- Yasika, 1992, Is there a Future for Me?, Medan, Tanpa Penerbit.